

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Modern democracy is a party democracy (demokrasi modern adalah sebuah demokrasi partai) demikian *statement* yang dipopulerkan Richard Katz dalam *A Theory of Parties and Electoral Sistem*.¹ Sudah menjadi pendapat umum bahwa tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa partai politik, dengan demikian, sebagai prasyarat negara demokratis adalah adanya partai politik. Indonesia merupakan negara yang menganut ajaran demokrasi dalam mengatur tatanan politik, tak dapat ditawar lagi, partai politik adalah suatu keharusan. Partai politik adalah nafas dari kebebasan dalam politik untuk menggapai cita-cita bangsa, walaupun kenyataannya partai politik hanya sebagai pembebasan dari (*freedom from*) bukan kebebasan untuk (*freedom for*)². Dengan perkembangan politik di Indonesia berharap partai politik mampu sebagai jembatan aspirasi masyarakat.

Di Indonesia Sistem politik pertama menganut sistem parlementer (1945-1959) yang berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-undang Dasar 1949 dan 1950. Sistem ini mengalami ketidakcocokan terhadap kondisi Indonesia karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan rakyat.³ Sistem parlemeter ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1950 dimana badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala Negara dan menteri-menterinya mempunyai tanggung jawab secara politik. Umumnya, kabinet pra pemilihan umum 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan yang menyebabkan menghambat dalam stabilitas politik maupun perekonomian Negara.

Diantara faktor yang menyebabkan mandeknya sistem ini adalah koalisi pemerintahan yang tidak solid dan kadang partai politik yang berkoalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga dalam kabinet sering kali jatuh karena keretakan dalam

¹ Kacung Marijan, "*Partai Baru, Electoral Treshold, dan Masa Depan Sistem Multipartai*", Jurnal Politica, Volume 2, 2006, hal. 37

² Isaiah Berlin, *Empat esai Kebebasan*, (Jakarta: LP3ES dan Freedom Institute, 2004) , hal.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 128

koalisi sendiri.⁴ Selain faktor diatas, mandeknya sistem parlementer adalah faktor jabatan presiden yang tidak mendapatkan saluran dan tempat yang realistis dalam konstalasi politik padahal jabatan presiden adalah kekuatan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dan terakhir adalah faktor tentara yang karena lahir dalam revolusi merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Karena beberapa faktor itulah yang mendorong presiden Ir Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-undang Dasar 1945, sejak saat itu berakhirilah sistem parlementer.

Pasca Dekrit Presiden, masa demokrasi terpimpin (1959-1965) dengan ciri-ciri adalah dominasi kekuasaan oleh presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial-politik.⁵ Sejatinya dekrit sebagai buah jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat, tetapi kenyataannya hasil ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat presiden Soekarno seumur hidup telah menciptakan penyelewengan terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar. Selain itu, pada tahun 1960 Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak mempunyai wewenang untuk melakukan hal tersebut. Doktrin *Trias politica* (eksekutif, legislative dan yudikatif) sudah ditinggalkan sehingga menyebabkan kekuasaan tunggal. G 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang rezim Orde Baru.

Pada zaman Orde Baru- menganut demokrasi yang semu atau demokrasi palsu (*pseudo-democracy*). Di masa Orde Baru praktek demokrasinya hanya membolehkan tiga kekuatan politik (Golongan Karya (GOLKAR)⁶, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Golkar pada dasarnya merupakan warisan Orde Lama di masa Soekarno, atas ketidakpuasannya pada sistem multipartai periode 1950-1957 yang telah menghasilkan ketidakstabilan politik karena konflik parpol yang hebat. Seiring dengan melemahnya demokrasi

⁴ Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 2008)

⁵ Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 2008), hal.129

⁶ Pada zaman Orde Baru, Golkar secara resmi menganggap dirinya bukan partai politik, tetapi mencakup dalam istilah 'partai politik' pada umumnya, pen. Sedangkan Daniel Dhakidae mengatakan Golkar adalah 'golongan' yang pada dasarnya adalah suatu partai gado-gado, kemudian dengan sinis memposisikan Golkar berasal dari faham fascism Mussolini dan sejenisnya, dengan tekanan pada korporatisme profesionalisme. Lihat dalam *Partai Politik di Persimpangan Jalan*, Majalah Prisma, Volume 28, Juni 2009

konstitusional di Indonesia, Presiden Soekarno melaksanakan idenya untuk kekuatan politik non-parpol yang akan digunakan mengimbangi parpol. Kekuatan non-parpol ini adalah militer (ABRI) dan golongan fungsional yang kemudian berkembang menjadi Golongan Karya atau Golkar.⁷ Golkar sebagai modal kekuatan yang dilanjutkan Orde Baru dalam 6 (enam) pemilu mampu memenangkan secara berturut-turut dalam pemilu. Menurut Ward, dalam menggunakan strategi politik kemenangannya, Golkar pada pemilu 1971 sangat lekat dengan faktor rekayasa politik, termasuk melalui cara-cara pemaksaan dan represi para aparat negara untuk memenangkan pemilu tersebut.⁸

Pasca Reformasi, *Euphoria* politik merebak di wilayah Indonesia, dengan ditandai munculnya partai-partai politik, masyarakat berlomba-lomba mencari keberuntungan dalam politik untuk dipilih oleh rakyat sebagai representasi dari rakyatnya. Undang-undang politik yang meliputi UU partai politik, UU Pemilu, UU Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang baru yang disahkan pada tahun 1999. Langkah-langkah demokratisasi pada Undang-undang politik tersebut mendapatkan penilaian dunia internasional dan pemilu 1999 sebagai pemilu pasca reformasi dengan kontestasi 48 partai politik⁹ sebagai pemilu yang demokratis.

Dalam pemilu 1999, sebagai pemilu pertama pasca reformasi, rakyat Indonesia memberikan mandat lebih pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang digawangi oleh Megawati Soekarno Putri. Megawati menjelma sebagai perwujudan dari *wong cilik* yang hak-haknya terserabut dari Orde Baru. Dengan memosisikan diri sebagai orang yang tertindas, Megawati mampu mengangkat PDI-P sebagai partai yang mampu mendapat mandat rakyat. **(lihat table 1 untuk pemilu 1999)**

Pertanyaan kemudian, strategi apakah yang menyebabkan PDI-P sebagai pemenang dalam pemilu 1999?

Megawati pada 27 Juli 1997 merupakan titik balik dari orang yang terdzolimi oleh rezim, hal inilah yang menciptakan Megawati sebagai *vote getter* dan pemimpin bagi *wong cilik*. Mega,

⁷ Maswadi Rauf, "*Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia antara Kenyataan dan Harapan*", Jurnal Politika, Volume 2, 2006, hal. 11

⁸ Ken Ward, *The 1971 Election in Indonesia: an East Java case study*, Monash Papers on Southeast Asia No. 2 (Clayton, Monash University of Southeast Asian Studies, 1974)

⁹ Partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman terdapat 181 partai politik, lihat Tim Penelitian dan Pengembangan Kompas, *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*, Edisi Pemilihan Umum (Jakarta: Penerbit Kompas, 1999), hal.xi, 32

biasa di panggil, mampu membawa PDI-P meraup suara 35,689,073 atau 33,74 persen mampu mengalahkan partai yang berkuasa dalam pemilu selama 6 (enam) kali yaitu Golkar yang mendapatkan 23,741.749 atau 22,44 persen. Dengan perolehan tersebut PDI-P menjadi pemenang pada 1999. Daniel Dhakidae dalam *Partai Politik di Persimpangan Jalan*, menyebutnya adanya *vote of compassion* bagi penderitaan yang dialami selama Orde Baru, baik partai maupun Mega.¹⁰

Kemenangan PDI-P tidak berbanding lurus dengan jadinya Megawati sebagai presiden seiring dengan aturan di negeri ini. Megawati-wakil presiden- menjadi presiden justeru setelah Abdurahman Wahid ‘ditumbangkan’ dalam Sidang Istimewa (SI). Ketika berkuasa, partai ini lupa pada *vote of compassion* yang diberikan para pemilihnya. Hal-hal inilah yang menjelaskan ketiadaan antisipasi tanpa memperlihatkan prestasi, yang akhirnya *voter* menghakimi pada momentum pemilu berikutnya.

Tabel 1
Hasil Pemilu 1999

Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase %	Perolehan Kursi	Persentase %
PDIP	35.689.073	33,74	153	33,11
Golkar	23.741.749	22,44	120	25,97
PPP	11.329.905	10,71	58	12,55
PKB	13.336.982	12,61	51	11,03
PAN	7.528.956	7,12	34	7,35
PBB	2.049.708	1,93	13	2,81

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

Sedangkan pada 2004, Partai Golkar dengan paradigma barunya kembali memenangkan pemilu (**lihat table 2**), pasca menjadi partai politik di era reformasi. Konsep paradigma baru Golkar adalah mengharapkan partai ini dibangun dengan nilai-nilai baru yang selaras dengan tuntutan reformasi, yang terbuka (inklusif), mandiri (independen), demokratis, moderat, solid,

¹⁰ Daniel Dhakidae, *Partai Politik di Persimpangan Jalan*, Prisma No. 1 Vol. 28 Juni 2009, hal.89

mengakar dan responsive terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, bangsa dan negara dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara konsisten.¹¹

Dalam perjalanannya Partai Golkar sampai sekarang belum pernah sebagai barisan diluar pemerintahan, dengan tradisi inilah, subyektifitas penulis mengatakan bahwa setelah ketua Umum diambil alih yang berposisi sebagai wakil presiden M. Yusuf Kalla maka seluruh sumber daya partai untuk menopang pemerintahan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - M. Yusuf Kalla. Kenyataannya kesuksesan pemerintah kemudian menjadi legitimasi bagi Partai Demokrat, dan bukan bagi Partai Golkar.

Tabel 2 Hasil perolehan Partai politik dalam pemilu 2004

Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase %	Perolehan Kursi	Persentase %
P Golkar	24.480.757	21,58	128	23,27
PDI-P	21.026.629	18,53	109	19,81
PKB	11.989.564	10,57	52	9,45
PPP	9.248.765	8,15	58	10,54
P Demokrat	8.455.225	7,45	57	10,36
PKS	8.325.020	7,34	45	8,18
PAN	7.303.324	6,44	25	4,54

Sumber: Komisi Pemilihan Umum tahun 2004

Analisis mengenai kemenangan Partai Golkar menunjukkan bahwa selain faktor ketua Umum Partai, ada beberapa faktor yang menyebabkan posisi partai Golkar signifikan dalam konstalasi politik Indonesia. Pertama, infrastruktur politik Partai Golkar. kedua, “merek politik” Golkar sudah terlanjur “ mengakar”, sehingga sulit bagi yang lain, yakni mereka yang semula kader Golkar mendirikan partai politik sendiri, untuk melakukan klaim politik sebagai “ Golkar Sesungguhnya”. Ketiga, Partai Golkar diuntungkan oleh kondisi di lapangan, di mana

¹¹ Lihat Akbar Tandjung, *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 98

masyarakat banyak yang mengeluh soal merosotnya tingkat sosial-ekonomi mereka. Sebagian masyarakat merindukan “masa lalu” di zaman Golkar, dimana ketika Golkar berkuasa kondisi sosial-ekonomi tidak seburuk sekarang.¹²

Menghadapi pemilu 2004, partai Golkar dalam menjangkir calon presiden dan wakil presiden dari partai menggelar konvensi politik. Keputusan konvensi yang dilakukan Golkar, menurut Akbar Tandjung adalah kerangka memberikan kesempatan secara terbuka kepada siapa saja, tokoh-tokoh nasional yang terpanggil untuk menjadi calon presiden. Kesempatan tersebut bisa diikuti siapa saja, baik dari lingkungan Partai Golkar maupun luar partai. Menurutnya, konvensi bukan etalase demokrasi, melainkan sungguh-sungguh merupakan cerminan dari keinginan partai Golkar untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan Negara.¹³ Ide konvensi ini menyedot dan membetot perhatian kalangan masyarakat dan para akademisi sebagai terobosan demokrasi di Indonesia. Dengan strategi politik yang dilakukan Partai Golkar diatas mampu membawa angin segar partai dalam memenangkan kontestasi politik di pemilu 2004.

Pada pemilu 2004, Partai Demokrat sudah mengikuti kontestasi dengan hasilnya yang mengagumkan dengan 8.455.225 suara atau 7,45 persen,¹⁴ maka Partai Demokrat menempati posisi lima besar dan menghantar Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama berdasarkan pilihan rakyat.

2. PERMASALAHAN PENELITIAN

Sedangkan pada pemilu 2009 yang lalu, Partai Demokrat periode 2005-2010 memenangkan pemilu yang pemilu sebelumnya mendapatkan suara 8.455.225 atau 7,45 persen atau dikonversikan kursi di DPR 57 kursi menjadi 300 persen, yaitu 148 kursi di DPR, sungguh mengejutkan bagi kalangan masyarakat. Adanya mitos ‘partai besar’ menjadi hancur semua pada pemilu 2009. Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, meminjam istilah Daniel Dhakidae- menjadi tanda-tanda penyiksaan para pemilih terhadap keduanya. Lebih jauh

¹² Kholid Novianto, M. Alfian Alfian M dan Riyono Asnan, Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi, (Bekasi: Sejati-Press), cetakan ketiga, 2004, hal. 250

¹³ Kholid Novianto, M. Alfian Alfian M dan Riyono Asnan, Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi, (Bekasi: Sejati-Press), cetakan ketiga, 2004, hal.210

¹⁴ Perolehan suara dari Partai Demokrat dapat dilihat dalam *website* KPU dengan alamat www.kpu.go.id

Daniel menyitir istilah Plato bahwa “*alle Grösse steht im Sturm*”, semua yang besar terguncang-guncang.¹⁵ Jadi, tidak ada lagi istilah yang besar dan kecil; yang besar dan kecil menjadi nisbih.

TABEL 3
JUMLAH PEROLEHAN KURSI DPR PARNAS PESERTA PEMILU 2009¹⁶

NO URUT	PARTAI	KURSI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Hati Nurani Rakyat	18	3.922.870
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	26	4.646.406
8	Partai Keadilan Sejahtera	57	8.206.955
9	Partai Amanat Nasional	43	6.254.580
13	Partai Kebangkitan Bangsa	27	5.146.122
23	Partai Golongan Karya	107	15.037.757
24	Partai Persatuan Pembangunan	37	5.533.214
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	95	14.600.091
31	Partai Demokrat	150	21.703.137
T O T A L		560	85.051.132

Sumber: Komisi Pemilihan Umum tahun 2009

Secara sosiologi-politik, fenomena kemenangan Partai Demokrat periode 2005-2010 pada pemilu 2009 ini tentu saja menarik untuk diteliti, karena implisit partai ini mampu menjawab keinginan rakyat dari tahun 2004 ke tahun 2009. Tentu saja, *stakeholder* partai ini berjuang dan bekerja keras untuk kontestasi memenangkan pemilu 2009. Apa yang dikatakan Susilo Bambang Yudhoyono-pendiri partai-bahwa faktor kemenangan Partai Demokrat adalah karena kerja keras partai dan persiapan yang matang mulai dari 2005.

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai *Vote Getter* dalam pemilu 2009, Menurut para analis adalah merupakan kunci dari kemenangan partai Demokrat. Kemenangan 300 persen ini

¹⁵ Daniel Dhakidae, *Partai Politik di Persimpangan Jalan*, Prisma No. 1 Vol. 28 Juni 2009, hal.89

¹⁶ Catatan: Partai Politik (parpol) Peserta Pemilu 2009 yang diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR-RI adalah parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional (lolos *Parliamentary Threshold*)

menjadi menjadi buah dari kehancuran mitos partai besar dan partai tengah. Partai Golkar dan PDIP adalah partai yang ‘disiksa’ oleh kekuatan dari rakyat, istilah *vox populi vox day* menjadi senjata rakyat untuk menyiksa partai yang kurang berkenan di hatinya.

Hasil penelitian *exit poll* Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial, LP3ES, 9 April 2009 (lihat table 4) tentang tingkat kesetiaan para pemilih terhadap partai menunjukkan kesetiaan pemilih untuk memilih partai yang pernah dipilih dalam pemilihan sebelumnya sangat rendah. Hanya 3 (tiga) partai yang memiliki konstituen dengan kadar kesetiaan tinggi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mempertahankan 53,70 persen pemilih pada tahun 2004 untuk tetap berpihak padanya pada tahun 2009, disusul partai Demokrat yang mempertahankan 42 persen untuk tetap memilihnya dan PDIP yang mempertahankan suara 38,60 persen. Dan yang paling rendah kesetiannya dalam memilih adalah Partai Amanat Nasional (PAN).

Tabel 4¹⁷

HASIL PENELITIAN TINGKAT KESETIAAN PARA PEMILIH TERHADAP PARTAI

Partai yang dipilih pada tahun 2009	Partai yang dipilih pada 2004						
	Partai Golkar	PDIP	PKB	PPP	Partai Demokrat	PKS	PAN

¹⁷ *Exit poll*, LP3ES, 9 April 2009, penelitian ini dibuat terhadap 7541 pemilih di 1920 Tempat Pemilahan Suara (TPS) dalam pemilu legislative pada April 2009. Table menunjukkan pemilih tahun 2004 dan partai apa saja yang dipilih tahun 2009. Tulisan ini juga dikutip oleh Daniel Dhakidae di Majalah Prisma, No.1, Vol.28 Juni 2009, hal.90

GOLKAR	35,80%	5,90%	3,70%	1,30%	4,20%	3,30%	1,60%
PDIP	4,40%	38,60%	4,90%	2,10%	4,40%	3,30%	1,00%
PKB	1,20%	1,30%	34,30%	3,40%	1,50%	0,80%	0,00%
PPP	1,90%	1,30%	2,90%	31,50%	1,00%	0,80%	1,00%
P.Demokrat	13,40%	8,70%	7,50%	11,90%	42,00%	9,10%	7,30%
PKS	3,70%	3,50%	3,50%	6,00%	3,50%	53,70	39,10%
PAN	3,20%	2,40%	2,00%	2,60%	1,70%	%	20,30%
P.Hanura	2,00%	3,00%	1,70%	2,60%	3,90%	3,30%	3,10%
Gerindra	3,10%	3,00%	2,00%	2,60%	2,70%	0,80%	2,10%
Lainnya	10,90%	9,60%	16,10%	10,20%	6,50%	2,50%	4,20%
Tidak memilih	0,30%	0,60%	0,00%	0,40%	0,40%	6,60%	0,00%
Menolak member Informasi	20,00%	21,90%	21,90%	25,50%	28,10%	0,80%	20,30%
						28,10 %	

*Swing voter*¹⁸ adalah sikap dan perilaku pemilih yang tidak terikat oleh partai politik menunjukkan sekitar 47 persen¹⁹, dengan begitu dibutuhkan kerja keras dan strategi politik dalam meyakinkan pemilih untuk memenangkan kontestasi di pemilu. *Swing voter* bersumber dari buruknya citra partai dimata pemilih, tetapi pemilih mempunyai harapan sehingga lebih memposisikan diri untuk *swing* dari pada golongan putih (Golput). Daniel Sparringa menyoroti peran partai politik yang dianggap kurang serius menjalankan agenda reformasi untuk tujuan reformasi. Lebih jauh Daniel menjelaskan, secara umum partai-partai politik di Indonesia menjadi kehilangan orientasi ideologinya yang sejati bagi sebuah perubahan yang bermakna.²⁰

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan meneliti secara ilmiah bagaimana strategi partai Demokrat periode 2005-2010 dalam memenangkan pemilu dan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan partai dalam memenangkan pemilu 2009. Oleh sebab itu, penulis setidaknya ada pertanyaan-pertanyaan yang ditelaah, antara lain:

¹⁸ *Swing Voter* adalah sikap dan perilaku pemilih yang tidak terikat oleh sebuah partai politik dalam kurun waktu yang cukup lama. Lihat Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Kecenderungan *Swing Voter* Menjelang Pemilu Legislatif 2009 pada November 2008

¹⁹ Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Kecenderungan *Swing Voter* Menjelang Pemilu Legislatif 2009 pada November 2008

²⁰ Daniel Sparringa dalam kata pengantar *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi* karangan Akbar Tandjung (Jakarta : Gramedia, 2007), hal.xxiii-xxiv

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan penelitian diatas, maka pertanyaan pokok (*grand tour question*) yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah strategi politik apa yang memenangkan Partai Demokrat periode 2005-2010 dalam kontestasi pemilu legislative pada tahun 2009?. Secara lebih rinci, penelitian ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan, yaitu kebijakan internal Partai Demokrat dan kebijakan eksternal Partai dalam memenangkan pemilu 2009?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mempelajari Strategi Partai Demokrat dalam memenangkan Pemilu 2009. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk:

1. Menggali strategi politik Partai Demokrat dalam Memenangkan Pemilu 2009 dikaitkan dengan pembangunan sosial
2. Memberikan rumusan rekomendasi bagi partai-partai dalam membuat kebijakan partai dalam prespektif sosial atau masyarakat sehingga harapan untuk memenangkan pemilu dapat terwujud.

4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Harapan penulis dalam penelitian ini adalah memberikan manfaat, manfaat secara teoritis maupun praktis, baik bagi diri penulis, masyarakat, maupun bagi pengembangan partai menuju partai modern dengan strategi-strategi partai yang berorientasi pada pembangunan sosial dengan implikasi dapat diterima dihati rakyat khususnya partai Demokrat yang jadi kajian penulis.

1. Manfaat Teoritis : memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan strategi Partai yang kaitannya dengan keberlakuan teori-teori kerangka konseptual tentang pembangunan sosial, elit, partisipasi politik, dan partai politik dalam pembahasan sosiologi politik.

2. Manfaat praktis:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal, *pertama*, memberikan rekomendasi ilmiah bagi *grand strategi* partai yang digulirkan oleh Partai Demokrat. Kebijakan ini hendaknya diarahkan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial melalui strategi partai. Dalam implementasinya, kebijakan ini juga harus memperhatikan peran elit partai dalam membuat kebijakan; *kedua*, hasil-hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi penulis selanjutnya dalam merumuskan kajian sosiologi terkait dengan upaya ilmiah untuk menggali strategi partai Demokrat dalam pembangunan sosial.

